

EVALUASI PROGRAM PEMBINAAN ANAK JALANAN DI KOTA MEDAN

SKRIPSI

OLEH:

FAHRIZAI

(178520057)



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN**

2021

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 3/6/25

Access From (repository.uma.ac.id)3/6/25

**EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM PEMBINAAN ANAK
JALANAN DI KOTA MEDAN**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana di Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Medan Area



PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2021

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 3/6/25

Access From (repository.uma.ac.id)3/6/25

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Evaluasi Kebijakan Program Pembinaan Anak Jalanan Di Kota

Medan.

Nama : Fahrizai

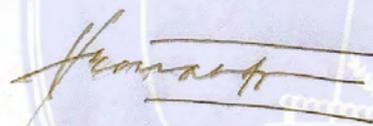
NPM : 17.852.20057

Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Di setuju oleh :

Komisi pembimbing

Pembimbing I



Dr. Heri Kusmanto, MA

Pembimbing II



Dr. Drs. Indra Muda, M.AP

Mengetahui:

Dekan



Dr. Walid Musthafa Sembiring, S.Sos, M.L.P

Prodi



Dr. Drs. Indra Muda, M.AP

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun beberapa bagian yang saya kutip dari berbagai sumber, saya telah menuliskan dengan jelas sumbernya sesuai dengan norma, kaidah dan etika dalam menulis karya ilmiah.

Jika plagiarisme ditemukan dalam skripsi ini di masa mendatang, saya bersedia menerima sanksi untuk pencabutan gelar saya dan sanksi lain yang berlaku kapan saja.

Medan, Agustus 2021



Fahrizai
178520057

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fahrizai
NPM : 178520057
Program Studi : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Evaluasi Program Pembinaan Anak Jalanan Di Kota Medan.

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada tanggal : Agustus 2021

Yang menyatakan



(Fahrizai)

Abstrak

Evaluasi merupakan pengukuran atau perbaikan dalam suatu kegiatan yang dilaksanakan ataupun suatu peninjauan ulang program yang telah dibuat dan dijalankan. Latar belakang dalam skripsi ini adalah dinas sosial pemerintah kota medan dalam melaksanakan pembinaan anak jalanan terdapat berbagai kendala dimana masih lemahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat, kurangnya kegiatan sosialisasi kegiatan yang dikarenakan masih minimnya dana yang digunakan, tempat yang masih belum tentu karena fasilitas yang dibutuhkan masih terbatas sehingga tempat pelaksanaan kegiatan masih menyewa tempat lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi program pembinaan anak jalanan di dinas sosial kota medan. Adapaun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinas sosial pemerintah kota medan sudah menerapkan program pembinaan anak jalanan dengan baik, walaupun masih ada ditemui kendala-kendala dalam penerapannya. Dengan penelitian ini, dapat dijadikan bahan masukan bagi dinas sosial pemerintah kota medan untuk menilai penerapan program pembinaan anak jalanan yang telah dilakukan, serta memberikan saran kepada dinas sosial untuk memperbaiki program pembinaan anak jalanan yang dianggap masih belum maksimal penerapannya.

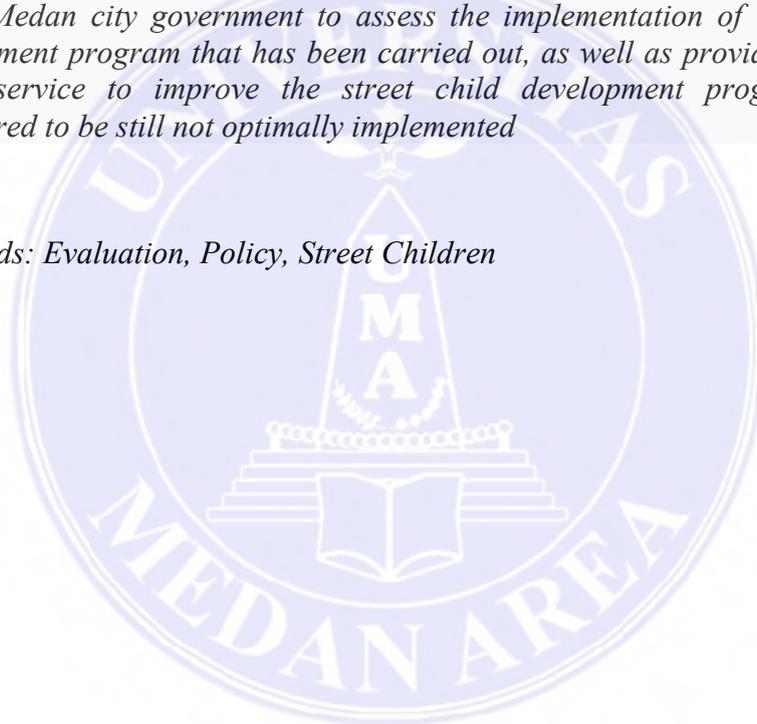
Kata Kunci: Evaluasi, Kebijakan, Anak Jalanan



Abstract

Evaluation is a measurement or improvement in an activity carried out or a review of programs that have been made and run. The background in this thesis is the social service of the Medan city government in carrying out the guidance of street children there are various obstacles where the knowledge and awareness of the community is still weak, the lack of socialization activities due to the lack of funds used, the place is still uncertain because the facilities needed are still limited. so that the place of implementation of the activity is still renting another place. This study aims to evaluate the street children development program at the Medan City Social Service. The approach used in this research is descriptive research type with a qualitative approach. The results of the study show that the social service of the Medan city government has implemented the street children development program well, although there are still obstacles in its implementation. With this research, it can be used as input for the social service of the Medan city government to assess the implementation of the street child development program that has been carried out, as well as provide advice to the social service to improve the street child development program which is considered to be still not optimally implemented

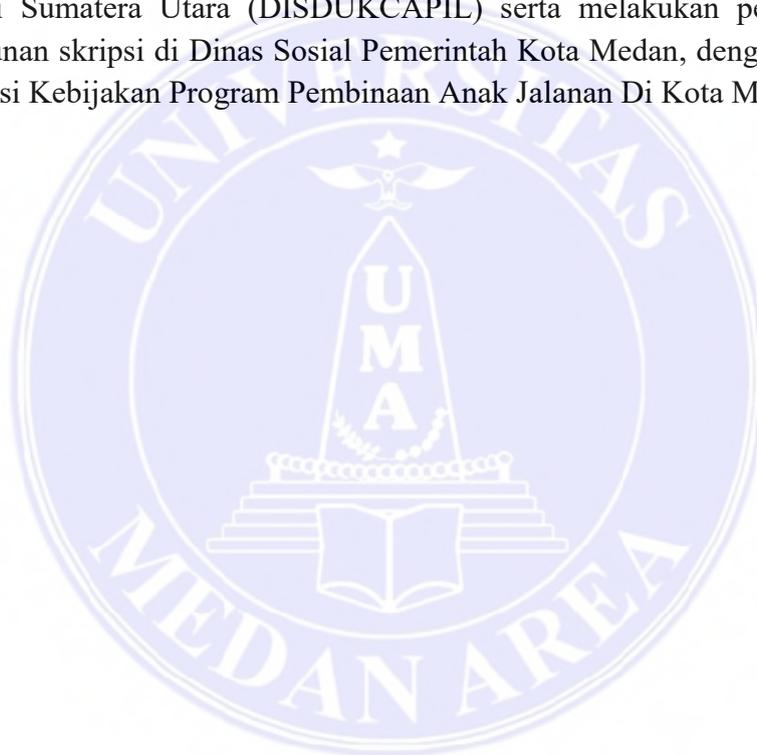
Keywords: Evaluation, Policy, Street Children



RIWAYAT HIDUP

Penulis lahir di Bandar pulau kebun, provinsi sumatera utara, kabupaten asahan pada tanggal 15 agustus 1998, anak ketiga dari Ayahanda Nasib dan Ibunda Iyusnani. Riwayat pendidikan penulis adalah MIS Nurul Husna, MTS Nurul Husna, dan SMA Yayasan Swasta Saniah.

Tahun 2017 melanjutkan studi di Universitas Medan Area (UMA) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan jurusan program Studi Administrasi Publik. Selama mengikuti perkuliahan penulis melaksanakan kuliah kerja lapangan (KKL) di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (DISDUKCAPIL) serta melakukan penelitian dalam penyusunan skripsi di Dinas Sosial Pemerintah Kota Medan, dengan judul skripsi “Evaluasi Kebijakan Program Pembinaan Anak Jalanan Di Kota Medan”.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala berkah dan karunia-nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini merupakan syarat untuk meraih gelar sarjana Administrasi Publik di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Medan Area. Adapun judul skripsi ini adalah **"Evaluasi Program Pembinaan Anak Jalanan Di Kota Medan"**. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bimbingan, arahan, bantuan dan dukungan baik dari segi moral maupun material. Untuk itu dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Heri Kusmanto MA, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area
2. Bapak Dr. Heri Kusmanto MA, selaku pembimbing I penulis yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan arahan serta bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Drs. Indra Muda,MAP, selaku pembimbing II penulis yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan saran dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. ibu Chairika Nasution, S.AP, M.AP, selaku Sekretaris Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan saran dan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area yang telah mengajarkan mendidik penulis dan berkontribusi dalam menyelesaikan skripsi ini

6. Seluruh Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah membantu penulis dalam urusan administrasi serta memberikan perkembangan informasi berupa jadwal di dalam pelaksanaan setiap acara kegiatan atau aktivitas didalam penyelesaian skripsi ini.
7. Untuk seluruh pegawai perpustakaan yang telah memberikan pelayanan terbaik saat peminjaman buku.
8. Kedua orang tua saya, Papa tercinta Mangiring Simbolon dan Mama tercinta Rosita Sihotang yang telah memberikan semangat dan motivasi membiayai dan memberikan doa yang tiada henti demi keberhasilan dan masa depan saya.
9. Bapak Fakhruddin, SH, selaku sekretaris Dinas Sosial Kota Medan yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian.
10. Semua informan yang telah membantu memberikan informasi yang sangat berguna dalam penelitian ini.
11. Sahabat-Sahabat saya dan teman teman Mahasiswa Administrasi Publik Stambuk 2017 yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan penulis skripsi ini.
12. Sahabat-Sahabat saya the Manis Manja yang telah memberikan masukan, saran dan semangat.
13. semua pihak yang memberikan bantuan dan selalu memberikan dukungan selama penulisan artikel ini tidak dapat disebut satu persatu. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak

kekurangan, oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Medan, Maret 2021
Penulis

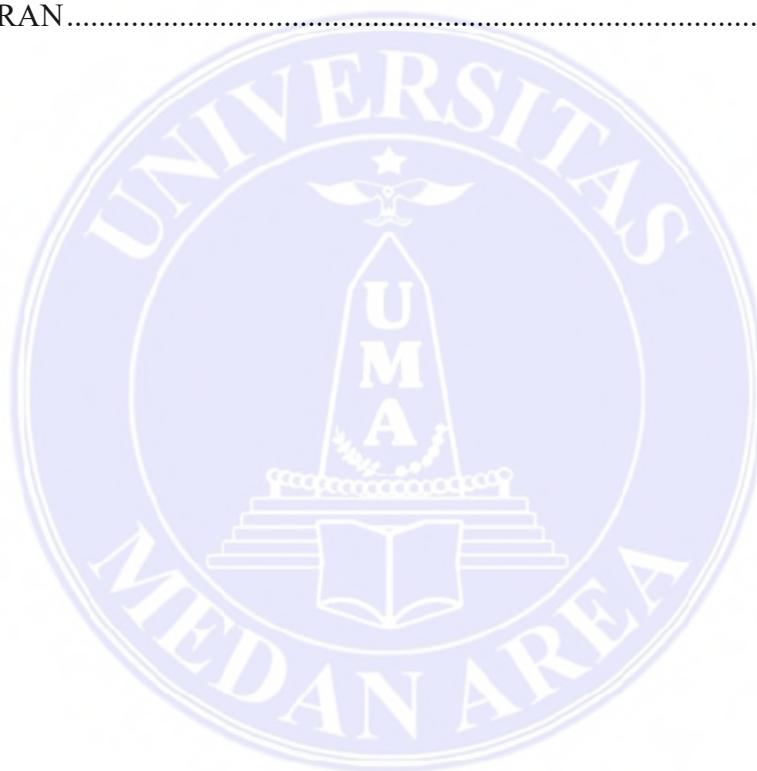
Fahrizai 17.852.0057



DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
RIWAYAT HIDUP	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Permusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.4. Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	5
2.1. Evaluasi	5
2.2. Fungsi Dan Tujuan Evaluasi	9
2.3. Evaluasi Program Dan Manfaatnya	10
2.4. Program Pembinaan Anak Jalanan	21
2.5. Karakteristik Anak Jalanan	25
2.6. Faktor-Faktor Penyebab Timbulnya Anak Jalanan.....	26
2.7. Model Pelayanan Sosial Bagi Anak Jalanan.....	28
2.8. Penelitian Relevan	29
2.9. Kerangka Pemikiran.....	35
BAB III METODE PENELITIAN.....	38
3.1. Jenis Penelitian.....	38
3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian	39
3.3. Informan Penelitian.....	39
3.4. Teknik Pengumpulan Data	40
3.5. Teknik Analisis Data.....	41
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	44
4.1. Hasil Penelitian	44
4.1.1. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Medan	44
4.1.2. sejarah Dinas Sosial Kota Medan	44
4.1.3. visi misi dinas sosial kota medan.....	46
4.1.4. tugas dan fungsi dinas sosial kota medan	47
4.1.5. renstra dinas sosial kota medan.....	47
4.1.6. lakip dinas sosial kota medan	50

4.1.7.kedudukan,tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi.....	51
4.2. pembahasan penelitian	57
4.2.1.evaluasi program pembinaan anak jalanan di dinas sosial kota medan	57
4.2.2.faktor penghambat dalam melakukan pembinaan anak jalanan di dinas sosial kota medan.....	67
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	70
5.1. Simpulan	70
5.2. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN	75



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....37



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Evaluasi merupakan pengukuran atau perbaikan dalam suatu kegiatan yang dilaksanakan. Seperti membandingkan hasil-hasil kegiatan yang telah direncanakan, dari situlah tujuan evaluasi tersebut sangat penting agar rencana-rencana yang telah dibuat dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan dapat terselenggarakan. Suatu proses evaluasi dapat dilihat sebagai akhir dari proses kebijakan, tetapi dapat juga diartikan tidak. Evaluasi adalah kegiatan rutin dan kita ingin memahami dampak proyek atau rencana. Hasil evaluasi muncul dalam bentuk informasi, yang akan digunakan untuk memperbaiki atau menghentikan proyek atau rencana di masa mendatang.

Terkait dengan pembinaan anak jalanan di Kota Medan perlu kita ketahui bahwa sejalan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia keempat menegaskan bahwa tujuan Negara ialah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa yang kemudian diturunkan dalam pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara”. Dan berdasarkan Perda Nomor 6 tahun 2003 Pasal 4 tentang larangan dan pengemisian serta praktek susila di Kota Medan. Pemerintah daerah melakukan pembinaan terhadap gelandangan dan pengemis serta tuna susila berupa kegiatan yang berbentuk dan mencakup keterampilan-keterampilan serta keahlian lainnya.

Anak jalanan atau sering disingkat anjal adalah sebuah istilah umum yang mengacu pada anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi dijalanan, namun masih memiliki hubungan dengan keluarganya. Anak-anak jalanan merupakan anak-anak yang rentan, serta mempunyai kebutuhan-kebutuhan khusus yang menghabiskan sebagian waktu mereka untuk bekerja dijalanan, pusat keramaian, baik sebagai pedagang ataupun pemulung, pengemis, pengamen, pembersih kaca mobil, manusia silver, atau buruh pasar yang berkeliaran tidak menentu.

Merebaknya anak jalanan di Indonesia khususnya Kota Medan merupakan persoalan sosial yang kompleks. Hidup menjadi anak jalanan bukan merupakan pilihan yang menyenangkan, karena mereka berada dalam kondisi yang tidak memiliki masa depan yang jelas, dimana keberadaan mereka sering kali menjadi masalah bagi banyak pihak keluarga, masyarakat dan Negara. Namun perhatian terhadap nasib anak jalanan tampaknya belum begitu besar, padahal mereka juga adalah saudara kita, mereka adalah amanah Tuhan yang harus dilindungi, dijamin hak-haknya. Sehingga tumbuh kembang menjadi manusia dewasa yang bermanfaat, beradab dan bermasa depan cerah.

Keberadaan anak jalanan yang hingga kini masih menuai masalah tanpa ada solusi yang tepat untuk mengatasinya merupakan salah satu akibat dari kemiskinan. Keberadaan anak yang hidup di jalan saat ini mudah kita temui di sudut-sudut kota besar terutama Kota Medan. Mata kita sudah tidak asing lagi melihat anak-anak yang mengerumuni mobil-mobil dipersimpangan lampu merah. Mereka mendatangi warung-warung pinggir jalan menawarkan jasa atau sekedar meminta sumbangan. Aktivitasnya dimulai dengan bermain musik, menjual koran, menyemir sepatu hingga meminta sumbangan dengan kotak amal.

Kehadiran anak jalanan yang semakin besar jumlahnya dirasakan semakin mencemaskan, karena disatu sisi dapat menimbulkan dampak negatif bagi penertiban, kebersihan dan keamanan, serta keindahan kota. Melihat berbagai kondisi yang dialami anak jalanan, maka Pemerintah Kota Medan khususnya melalui Dinas Sosial Kota Medan perlu mengadakan program pembinaan anak jalanan, dimana dengan program yang nyata akan tercipta kebijakan utama untuk mengentaskan masalah anak jalanan. Disamping itu, kelanjutan dari program pembinaan anak jalanan yang dilakukan oleh Dinas Sosial adalah evaluasi yang nyata dengan diharapkan terciptanya lapangan pekerjaan yang sesuai dengan usia anak dan tidak terlalu membahayakan keselamatan jiwanya sehingga mereka tidak turun ke jalanan untuk bekerja.

Dengan adanya program pembinaan anak jalanan yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan, hal ini bertujuan untuk membina anak jalanan baik dalam pemberian mental, rohani dan pemberian bantuan untuk kebutuhan mereka sehingga dapat meminimalisasikan keberadaan mereka di jalanan. Di sisi lain, setiap program atau suatu kegiatan tentu tidak selamanya berjalan sesuai tujuan atau rencana yang diinginkan. Hambatan dalam input, proses dan hasil dari program atau kegiatan membuat pelaksanaan tak sesuai yang diinginkan. Para pekerja profesional khususnya di bidang sosial beranggapan bahwa perlu melakukan evaluasi dan monitoring dari awal dibuatnya program sampai akhir apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. Seperti halnya dalam implementasi program pembinaan anak jalanan di Kota Medan dimana belum lah sesuai dengan apa yang diharapkan, mengingat kendala yang dihadapi seperti kurangnya kesadaran masyarakat dan fasilitas rumah singgah atau

panti sosial bagi anak jalanan, dana terbatas yang berasal dari pusat dan daerah menjadi penghambat untuk melaksanakan program tersebut. Untuk itulah penulis ingin melihat lebih dalam bagaimana evaluasi implementasi program pembinaan anak jalanan apakah sudah terealisasi dengan baik atau belum dengan mengangkat judul “Evaluasi Kebijakan Program Pembinaan Anak Jalanan di Kota Medan”.

1.2 Perumusan Masalah

- 1) Bagaimana evaluasi program pembinaan anak jalanan di Kota Medan?
- 2) Apa faktor penghambat dalam melakukan pembinaan anak jalanan di kota medan?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengevaluasi program pembinaan anak jalanan di Kota Medan.
- 2) Untuk mengetahui faktor penghambat dalam melakukan pembinaan anak jalanan di kota medan.

1.4 Manfaat Penelitian

- 1) Penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan di bidang sosial melalui penelitian yang dilaksanakan sehingga memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu administrasi publik khususnya.
- 2) Sebagai bahan pemahaman dan pembelajaran bagi peneliti maupun mahasiswa lain untuk melakukan penelitian-penelitian secara lebih mendalam mengenai evaluasi program pembinaan anak jalanan di Kota Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Evaluasi

Istilah evaluasi memiliki arti yang saling terkait, yang masing-masing mengacu pada penerapan berbagai skala nilai pada kebijakan dan hasil program. Secara umum istilah "evaluasi" dapat disamakan dengan "evaluasi", "peringkat" dan "evaluasi", kata-kata ini berarti upaya untuk menganalisis hasil kebijakan dalam satuan nilai.

Menurut Dunn dalam Akbar M. Firyal (2018:14) Secara umum bahwa evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating), dan penilaian (assesment). Dalam arti spesifik evaluasi berkaitan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijaksanaan. Evaluasi kebijakan adalah suatu kegiatan untuk menilai tingkat pencapaian tujuan kebijakan.

Anderson dalam Akbar M. Firyal (2018:15) “memandang evaluasi sebagai proses menentukan hasil yang dicapai oleh sejumlah kegiatan yang direncanakan untuk mendukung pencapaian tujuan.” Sedangkan Stufflebeam dalam Akbar M. Firyal (2018:16), “mengungkapkan bahwa Evaluasi merupakan proses penggambaran, pencarian dan pemberian informasi yang bermanfaat bagi pengambil keputusan dalam menentukan alternatif keputusan”.

Jadi dapat disimpulkan bahwa evaluasi kebijakan adalah suatu usaha untuk melihat tingkat keberhasilan dan kegagalan dari sebuah kebijakan, sehingga mampu memberi penilaian tentang penerapan kebijakan tersebut untuk di perbaiki oleh pelaku kebijakan.

Bentuk dan macam evaluasi menurut Borus dalam Mulyadi (2016:87), antara lain:

1. *Pre-evaluation/politic evaluation*: bagaimana program itu akan dilaksanakan? (layak atau tidak layak, tepat atau tidak tepat)
2. *Monitoring*: bagaimana kebijakan tersebut sedang dilaksanakan? (menyimpan dari rencana atau tidak)
3. *Post evaluation/impact evaluation*: apa yang telah dicapai dari kebijakan tersebut? (mengetahui dampak dari kebijakan)

Dunn dalam Mulyadi (2016:122) Situasi umum evaluasi adalah bahwa kebutuhan yang dihasilkan oleh evaluasi bersifat evaluatif. Oleh karena itu, evaluasi mempunyai banyak karakteristik yang berbeda dengan metode analisis kebijakan lainnya, yaitu: (1) *Value-centered*, menunjukkan bahwa evaluasi adalah suatu kegiatan, dan manfaat atau penggunaan rencana atau kebijakan memberi nilai; (2) Fakta nilai adalah saling bergantung, Hasil evaluasi tidak hanya tergantung pada bukti, tetapi juga tergantung pada nilai; (3) Arah saat ini dan masa lalu, evaluasi untuk mempersonalisasi hasil saat ini dan masa lalu; (4) Dualitas nilai, nilai sebagai dasar kebutuhan evaluasi memiliki dua kualitas, Karena keduanya dilihat sebagai tujuan dan sarana.

Nugroho dalam Mulyadi (2016:94) “Evaluasi kebijakan publik, tentang apakah rumusan kebijakan publik telah dilaksanakan”. Menurut waktu evaluasi, evaluasi pelaksanaan kebijakan dibagi menjadi tiga, yaitu sebelum evaluasi, selama pelaksanaan dan setelah pelaksanaan. Evaluasi yang sedang berlangsung biasanya disebut evaluasi proses. Evaluasi setelah kebijakan disebut juga evaluasi akibat (*output*) kebijakan dan / atau evaluasi dampak akibat (*outcome*) kebijakan, atau evaluasi sumatif.

Istilah evaluasi formatif dikenalkan oleh Michael Scriven dalam Akbar (2018: 51) pada tahun 1967. Istilah evaluasi perkembangan awalnya digunakan sebagai istilah evaluasi merupakan tahap perantara dalam pengembangan perangkat pengajaran. Menurut Scriven, evaluasi formatif adalah putaran umpan balik untuk meningkatkan suatu produk. The "*Plan Evaluation Standards*" (1994) mendefinisikan evaluasi formatif sebagai evaluasi yang dirancang dan dikelola untuk memperbaiki objek (terutama saat mengembangkan objek).

1. Jenis Evaluasi Formatif

Jenis penilaian formatif meliputi:

- 1) Evaluasi administratif, yaitu evaluasi yang berkaitan dengan kepatuhan keuangan dan prosedural dalam lingkungan pemerintahan.
- 2) Evaluasi yudisial, yaitu evaluasi yang berkaitan dengan obyek hukum.
- 3) Evaluasi politik, yaitu evaluasi yang dilakukan oleh lembaga politik.

2. Aspek-aspek evaluasi formatif

Aspek-aspek kinerja implementasi yang dievaluasi dalam evaluasi formatif, antara lain sebagai berikut.

- 1) *Effort evaluation*, yaitu menilai kesesuaian investasi yang direncanakan.
- 2) *Performance evaluation*, yaitu memeriksa perbandingan keluaran dengan masukan program.
- 3) *Effectiveness evaluation*, yaitu memeriksa pelaksanaannya sesuai dengan maksud dan tujuan.
- 4) *Efficiency evaluation*, yaitu membandingkan biaya dan keluaran yang direalisasikan.

5) *Process evaluation*, yaitu memeriksa metode implementasi, aturan dan prosedur dalam implementasi

Menurut Wiiliam N. Dunn dalam Anggara (2018: 279-280), “ aspek-aspek kinerja kebijakan yang harus dievaluasi yaitu: efektifivitas, efisien, kecukupan, responsivitas dan ketepatan”.

Adapun yang penting di amati mengenai indikator menggunakan teori model evaluasi menurut Dunn.

1. Efektivitas yaitu apakah apa tujuan sesuai dengan harapan berdasarkan tindakan. Yang secara dekat selalu diukur dari unit produk, sesuai dengan rasionalitas teknis atau layanan.
2. Kecukupan yaitu menilai tingkat efektivitas nilai, kebutuhan, dan kesempatan yang menumbuhkan suatu masalah. Kecakupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan memprediksi tingkat kepuasan nilai, kesempatan dan kebutuhan.
3. Perataan yaitu bagian rasionalitas social dan legal pada penyaluran usaha dan akibat antara kelompok-kelompok tidak sama di masyarakat. Kebijakan ini berorientasi kepada kebijakan dan usaha secara adil.
4. Responsivitas yaitu terkait dengan tingkat kepuasan suatu kebijakan sesuai dengan kebutuhan, nilai kempompok dan preferensi. Keberhasilan kebijakan dilihat melalui tanggapan masyarakat yang merespon setelah terjadinya pelaksanaan program atau kebijakan serta dampak kebijakan.
4. Ketepatan yaitu bagian dari alternative alam merekomendasikan nilai dari tujuan program yang layak sesuai dengan kebutuhan. Kriteria kelayakan

memiliki hubungan rasionalitas substantive demi terealisasinya tujuan utamanya.

2.2. Fungsi Dan Tujuan Evaluasi

Evaluasi memiliki beberapa arti penting menurut Dunn dalam Mulyadi (2016:124) fungsi utama dari evaluasi kebijakan adalah:

1. Bagian terpenting dari fungsi evaluasi adalah memberikan informasi yang efektif dan dapat diandalkan tentang kinerja kebijakan.
2. Mempromosikan klasifikasi dan kritik nilai berdasarkan tujuan dan pemilihan sasaran.
3. Evaluasi membantu menerapkan metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi.

Adapun yang menjadi tujuan dari evaluasi kebijakan, yaitu:

1. Mengukur dampak suatu rencana / kebijakan terhadap kehidupan masyarakat dengan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah menyusun rencana. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa diperlukan suatu metode penelitian. Sedangkan untuk membandingkan efek dengan tujuan, Anda harus menggunakan ukuran kesuksesan.
2. Memperoleh informasi tentang kinerja implementasi kebijakan, dan mengevaluasi kesesuaian dan perubahan rencana dan rencana.
3. Memberikan umpan balik kepada manajemen untuk meningkatkan / menyempurnakan implementasi.

4. Memberikan saran kepada pengambil keputusan agar dapat mengambil keputusan lebih lanjut tentang rencana masa depan sebagai bentuk pertanggungjawaban publik / realisasi pertanggungjawaban publik.

2.3. Evaluasi Program Dan Manfaatnya

Secara umum program diartikan sebagai “rencana”. Program didefinisikan sebagai suatu unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan, berlangsung dalam proses yang berkesinambungan, dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang. Sebuah program bukan hanya kegiatan tunggal yang dapat diselesaikan dalam waktu singkat, tetapi merupakan kegiatan yang berkesinambungan karena melaksanakan suatu kebijakan. Oleh karena itu, sebuah program dapat berlangsung dalam kurun waktu relatif lama. Pengertian program adalah suatu unit atau kesatuan kegiatan maka program merupakan sebuah sistem, yaitu rangkaian kegiatan yang dilakukan bukan hanya satu kali tetapi berkesinambungan. Pelaksanaan program selalu terjadi di dalam sebuah organisasi yang artinya harus melibatkan sekelompok orang. Pengertian program yang dikemukakan di atas adalah pengertian secara umum (Arikunto, 2010: h. 3-4).

Program juga dapat dimaknai sebagai sebagai suatu kegiatan yang direncanakan dengan saksama, tujuan pentingnya ialah pengambilan keputusan. Hal ini sesuai dengan anjuran Spaulding yang mengatakan: “Program evaluation is conducted for decision making purpose”. Artinya, evaluasi program dilakukan untuk tujuan pengambilan keputusan (Sukardi, 2014: h. 3).

Evaluasi program adalah suatu proses mengumpulkan dan menganalisis data sehingga menjadi satu kegiatan luas dan komprehensif yang digunakan untuk mengambil keputusan penting terkait dengan program atau proyek yang dinilai. Evaluasi program selalu berkaitan dengan batasan program. Oleh karena itu, pertanyaan yang muncul adalah mengenai arti program itu sendiri (Sukardi, 2014: h. 4).

Farida Yusuf Tayibnasis memandang program sebagai segala sesuatu yang dicoba lakukan seseorang dengan harapan akan mendatangkan hasil atau pengaruh. Dalam pengertian tersebut ada empat unsur pokok untuk dapat dikategorikan sebagai program, yaitu : 1) Kegiatan yang direncanakan atau dirancang dengan saksama. 2) Kegiatan tersebut berlangsung secara berkelanjutan dari satu kegiatan ke kegiatan yang lain. 3) Kegiatan tersebut berlangsung dalam sebuah organisasi, baik organisasi formal maupun organisasi non formal bukan kegiatan individu. 4) Kegiatan tersebut dalam implementasi atau pelaksanaannya melibatkan banyak orang (Tayibnasis, 2000: h. 9).

Satu pengertian pokok yang terkandung dalam evaluasi adalah adanya standar, tolak ukur, atau kriteria. Mengevaluasi adalah melaksanakan upaya untuk mengumpulkan data mengenai kondisi nyata suatu hal, kemudian dibandingkan dengan kriteria, agar dapat diketahui seberapa jauh atau seberapa tinggi kesenjangan yang ada antara kondisi nyata tersebut dengan kriteria sebagai kondisi yang diharapkan.

Didalam pelayanan sosial, evaluasi adalah kegiatan penilaian terhadap kinerja dan unjuk kerja dari proses dan hasil pelaksanaan kegiatan pelayanan sosial. Evaluasi dilakukan terutama untuk mengetahui sejauh mana tujuan

program pelayanan tercapai atau belum. Seperti yang dikemukakan oleh Ralph Tyler yaitu evaluasi adalah proses yang menentukan sampai sejauh mana tujuan pendidikan dapat dicapai. Standar penilaian adalah indikator-indikator keberhasilan yang telah direncanakan sebelumnya dan pengungkapan masalah kinerja program pelayanan untuk memberikan umpan balik bagi peningkatan kinerja program pelayanan sosial (Tayibnapis, 2000: h. 3).

Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor : Kep. 178/K/07/2000 tanggal 18 Juli 2000 tentang evaluasi kinerja pembangunan, dikemukakan bahwa evaluasi kebijakan program mempunyai peranan yang sangat penting, sebab banyak program pembangunan, kurang mengetahui kegagalan dan keberhasilan serta tidak lanjut program. Evaluasi kinerja asih terbatas pada perkembangan pelaksanaan yang dilakukan melalui sistem pemantauan, sedangkan evaluasi dilaksanakan setelah program selesai/berfungsi yang dikenal dengan Performance Evaluation belum dilakukan secara sistematis dan melembaga. Evaluasi kinerja adalah bagian dari manajemen pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi mengenai hasil, manfaat dan dampak program yang telah direncanakan dan/atau telah dilaksanakan untuk menilai serta mengevaluasi pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan. Evaluasi kinerja mencakup hal-hal yang lebih menyeluruh dan lebih menekankan pada umpan balik terhadap masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak yang diperoleh dari suatu program (Fesdyanda, 2012).

Sejalan dengan pengertian yang terkandung didalamnya, bahwa evaluasi evaluatif memiliki syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Proses kegiatan penulisan tidak menyimpang dari kaidah-kaidah yang berlaku bagi penulisan pada umumnya.
- 2) Dalam melaksanakan evaluasi, penulis harus berpikir secara sistematis, yaitu memandang program yang diteliti sebagai sebuah kesatuan yang terdiri dari beberapa komponen atau unsur yang saling berkaitan satu sama lain dalam menunjang keberhasilan kinerja dari objek yang dievaluasi.
- 3) Agar dapat mengetahui secara rinci kondisi dari objek yang dievaluasi, perlu adanya identifikasi komponen yang berkedudukan sebagai faktor penentu bagi keberhasilan program.
- 4) Menggunakan standar, kriteria, atau tolok ukur sebagai perbandingan dalam menentukan kondisi nyata dari data yang diperoleh dan untuk mengambil kesimpulan.
- 5) Kesimpulan atau hasil penulisan digunakan sebagai masukan atau rekomendasi bagi sebuah kebijakan atau rencana program yang telah ditentukan. Dengan kata lain, dalam melakukan kegiatan evaluasi program, penulis harus berkiblat pada tujuan program kegiatan sebagai standar, kriteria, atau tolok ukur.
- 6) Agar informasi yang diperoleh dapat menggambarkan kondisi nyata secara rinci untuk mengetahui bagian mana dari program yang belum terlaksana, maka perlu ada identifikasi komponen yang dilanjutkan dengan identifikasi subkomponen, sampai pada indikator dari program yang dievaluasi.

- 7) Standar, kriteria, atau tolok ukur diterapkan pada indikator, yaitu bagian yang paling kecil dari program agar dapat dengan cermat diketahui letak kelemahan dari proses kegiatan.
- 8) Dari hasil penulisan harus dapat disusun sebuah rekomendasi secara rinci dan akurat sehingga dapat ditentukan tindak lanjut secara tepat (Arikunto, 2010: h.8-9).

Evaluasi program bermanfaat bagi pengambil keputusan karena dengan masukan/informasi yang diperoleh dari hasil kegiatan evaluasi program itulah para pengambil keputusan akan menentukan tindak lanjut dari program yang sedang atau telah dilaksanakan. Wujud dari hasil evaluasi adalah sebuah rekomendasi dari evaluator untuk pengambil keputusan. Ada empat kemungkinan kebijakan yang dapat dilakukan berdasarkan hasil dalam pelaksanaan sebuah program keputusan, yaitu :

1. Menghentikan program, karena dipandang bahwa program tersebut tidak ada manfaatnya, atau tidak dapat terlaksana sebagaimana diharapkan.
2. Merevisi program, karena ada bagian-bagian yang kurang sesuai dengan harapan (terdapat kesalahan tetapi hanya sedikit).
3. Melanjutkan program, karena pelaksanaan program menunjukkan bahwa segala sesuatu sudah berjalan sesuai dengan harapan dan memberikan hasil yang bermanfaat.
4. Menyebarluaskan program (melaksanakan program di tempat-tempat lain atau mengulangi lagi program di lain waktu), karena program tersebut berhasil dengan baik maka sangat baik jika dilaksanakan lagi di tempat dan waktu yang lain (Arikunto, 2010: h. 22) .

Setelah kita menentukan obyek evaluasi selanjutnya harus menentukan aspek-aspek dari obyek yang akan evaluasi. Menurut Stake, 1967, Stufflebeam, 1959, Alkin 1969 (dalam Suharsimi, 2007) telah mengemukakan bahwa evaluasi berfokus pada empat aspek yaitu : a. Konteks b. Input c. Proses implementasi d. Produk Bridgman dan Davis (dalam Farida Yusuf, 2000) yaitu evaluasi program yang secara umum mengacu pada 4 (empat) dimensi yaitu : a. Indikator input b. Indikator process c. Indikator outputs d. Indikator outcomes.

Menurut Suharto (2005: h. 40) evaluasi kebijakan pada dasarnya merupakan alat untuk mengumpulkan dan mengelola informasi mengenai program atau pelayanan yang diterapkan. Evaluasi kebijakan menyediakan data dan informasi yang bias dipergunakan untuk menganalisis kebijakan dan menunjukkan rekomendasi-rekomendasi bagi perbaikan-perbaikan yang diperlukan agar implementasi kebijakan berjalan efektif sesuai dengan kriteria yang diterapkan (Suharto, 2005: h. 40).

Evaluasi merupakan cara untuk membuktikan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan dari suatu program, oleh karena itu pengertian evaluasi sering digunakan untuk menunjukan tahapan siklus pengelolaan program yang mencakup:

- 1) Evaluasi pada tahap perencanaan (EX-ANTE). Pada tahap perencanaan, evaluasi sering digunakan untuk memilih dan menentukan prioritas dari berbagai alternative dan kemungkinan cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya.

- 2) Evaluasi pada tahap pelaksanaan (ON-GOING). Pada tahap pelaksanaan, evaluasi digunakan untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan program dibandingkan dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.
- 3) Evaluasi pada tahap Pasca Pelaksanaan (EX-POST) pada tahap pasca pelaksanaan evaluasi ini diarahkan untuk melihat apakah pencapaian (keluaran/hasil/dampak) program mampu mengatasi masalah pembangunan yang ingin dipecahkan. Evaluasi ini dilakukan setelah program berakhir untuk menilai relevansi (dampak dibandingkan masukan), efektivitas (hasil dibandingkan keluaran), kemanfaatan (dampak dibandingkan hasil), dan keberlanjutan (dampak dibandingkan dengan hasil dan keluaran) dari suatu program.

Hubungan ketiga tahapan tersebut sangat erat, selanjutnya terdapat perbedaan metodologi antara evaluasi program yang berfokus kerangka anggaran dengan yang berfokus pada kerangka regulasi. Evaluasi program yang berfokus pada anggaran dilakukan dengan dua cara yaitu: Penilaian indikator kinerja program berdasarkan keluaran dan hasil dan studi evaluasi program berdasarkan dampak yang timbul. Cara pertama dilakukan melalui perbandingan indikator kinerja sasaran yang direncanakan dengan realisasi, informasi yang relevan dan cukup harus tersedia dengan mudah sebelum suatu indikator kinerja program dianggap layak. Cara yang kedua dilaksanakan melalui pengumpulan data dan informasi yang bersifat lebih mendalam (in-depth evaluation) terhadap hasil, manfaat dan dampak dari program yang telah selesai dilaksanakan. Hal yang paling penting adalah mengenai informasi yang dihasilkan dan bagaimana

memperoleh informasi, dianalisis dan dilaporkan. Informasi harus bersifat independen, obyektif, relevan dan dapat diandalkan.

Model evaluasi adalah model desain evaluasi yang dibuat oleh para ahli/pakar evaluasi yang biasanya dinamakan sama dengan pembuatnya. Model ini dianggap model standar. Disamping itu ahli evaluasi yang membagi evaluasi sesuai dengan misi yang akan dibawakannya serta kepentingan atau penekannya atau dapat juga disebut sesuai dengan paham yang dianut yang disebut pendekatan atau approach. Ada banyak model evaluasi antara lain :

1) Model Evaluasi CIPP

Model ini menurut Stufflebeam, 1983 (dalam Farida Yusuf, 2000) pendekatan yang berorientasi pada pemegang keputusan (a decision oriented evaluation approach structured) untuk menolong administrator dalam membuat keputusan. Ia merumuskan evaluasi sebagai suatu proses menggambarkan, memperoleh dan menyediakan informasi yang berguna untuk menilai alternative keputusan. Dia membuat pedoman kerja untuk melayani para manajer dan administrator menghadapi empat macam keputusan pendidikan, membagi evaluasi menjadi empat macam, yaitu:

1. Context evaluation to serve planning decision, konteks evaluasi ini membantu merencanakan keputusan, menentukan kebutuhan yang akan dicapai oleh program dan merumuskan tujuan program.
2. Input evaluation, structuring decision, evaluasi ini menolong mengatur keputusan, menentukan sumber-sumber yang ada, alternatif yang diambil, apa rencana dan strategi untuk mencapai kebutuhan, bagaimana prosedur kerja untuk mencapainya.

3. Process evaluation, to serve implementing decision, evaluasi proses untuk membantu mengimplementasikan keputusan sampai sejauh mana rencana telah dapat diterapkan? apa yang harus direvisi? Begitu pertanyaan tersebut terjawab prosedur dapat dimonitor, dikontrol dan diperbaiki.
4. Product evaluation, to serve recycling decision, evaluasi produk untuk menolong keputusan selanjutnya, apa hasil yang telah dicapai? apa yang dilakukan setelah program berjalan.

Keempat hal tersebut di atas merupakan sasaran evaluasi yang tidak lain adalah komponen dari proses sebuah program kegiatan. Model evaluasi CIPP adalah model evaluasi yang memandang program yang dievaluasi sebagai sebuah sistem. Dengan demikian apabila evaluator sudah menentukan model CIPP akan digunakan untuk mengevaluasi program yang ditugaskan maka mau tidak mau mereka harus menganalisis program tersebut berdasarkan komponennya. Model ini sekarang telah disempurnakan dengan satu komponen O singkatan dari outcomes, sehingga menjadi model CIPPO.

2) Model Evaluasi UCLA

Alkin, 1969 (dalam Tayibnaps & Farida Yusuf, 2008) menulis kerangka evaluasi yang hampir sama dengan model CIPP. Alkin mendefinisikan evaluasi sebagai suatu proses meyakinkan keputusan, memilih informasi sehingga dapat melaporkan ringkasan data yang berguna bagi pembuat keputusan dalam memilih alternatif, mengemukakan lima macam evaluasi, yakni:

1. Sistem assessment, yang memberikan informasi tentang keadaan atau posisi sistem,

2. Program planning, membantu pemilihan program tertentu yang mungkin akan berhasil memenuhi kebutuhan program,
3. Program implementation, yang menyiapkan informasi apakah program sudah diperkenalkan kepada kelompok tertentu yang tepat seperti yang direncanakan,
4. Program improvement, yang memberikan informasi tentang bagaimana program berfungsi, bagaimana program bekerja, atau berjalan? apakah menuju pencapaian tujuan, adakah hal-hal atau masalah-masalah baru yang muncul tak terduga,
5. Program certification, yang memberi informasi tentang nilai atau guna program.

3) Model Stake atau Model Countenance

Menekankan pada adanya pelaksanaan dua hal pokok yaitu deskripsi dan pertimbangan. Deskripsi menyangkut dua hal yang menunjukkan posisi sesuatu (yang menjadi sasaran evaluasi), yaitu apa maksud/tujuan yang diharapkan oleh program, dan pengamatan/akibat, atau apa yang sesungguhnya terjadi atau apa yang betul-betul terjadi. Sedangkan pertimbangan menunjukkan langkah pertimbangan, yang dalam langkah tersebut mengacu pada standar; serta membedakan adanya tiga tahap dalam evaluasi program, yaitu persiapan (antecedents), proses atau transaksi (transaction/process) dan keluaran (output) (Tayibnapi, 2000: h. 22).

4) Model Kesenjangan

Model ini menekankan bahwa penilaian kesenjangan dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kesesuaian antara standar yang sudah ditentukan dalam program dengan penampilan actual dari program tersebut. Standar adalah kriteria yang telah dikembangkan dan ditetapkan dalam program berdasarkan atas sumber,

prosedur dan manajemen dengan hasil yang efektif. Penampilan adalah sumber, prosedur, manajemen dan hasil yang tampak ketika program dilaksanakan. Langkah-langkah yang dilakukan dalam model kesenjangan adalah:

1. Tahap penyusunan desain, tahap ini dilakukan kegiatan seperti merumuskan tujuan program, menyiapkan obyek dan subyek sasaran program, dan merumuskan standar dalam bentuk rumusan sesuatu yang dapat diukur.
2. Tahap pemasangan instalasi, yaitu tahap melihat apakah kelengkapan yang tersedia sudah sesuai dengan yang diperlukan meliputi kegiatan meninjau kembali penetapan standar, meninjau ulang program yang sedang berjalan dan meneliti kesenjangan antara yang direncanakan dengan yang sudah dicapai.
3. Tahap proses, kegiatan yang dilakukan adalah mengadakan penilaian tujuan-tujuan yang sudah dicapai.
4. Tahap pengukuran tujuan, mengadakan analisis data dan menetapkan tingkat output yang diperoleh.
5. Tahap perbandingan, membandingkan hasil yang telah dicapai dengan tujuan yang ditetapkan. Dengan kemungkinan keputusan yang diambil adalah menghentikan program, merevisi, meneruskan dan memodifikasi tujuan.

2.4. Program Pembinaan Anak Jalanan

Program merupakan tahap-tahap dalam penyelesaian rangkaian kegiatan yang berisikan langkah-langkah yang akan dikerjakan untuk mencapai tujuan dan merupakan unsur pertama yang harus ada demi tercapainya kegiatan implementasi. Jika ditinjau dari aspek tingkat pelaksanaannya, secara umum pelaksanaan terhadap program dapat dikelompokkan kedalam dua jenis, yaitu:

1. Penilaian atas pelaksanaan, yaitu melakukan analisis tingkat kemajuan pelaksanaan dibandingkan dengan perencanaan, didalamnya meliputi apakah pelaksanaan program sesuai dengan apa yang direncanakan, apakah ada perubahan-perubahan sasaran maupun tujuan dari program yang sebelumnya direncanakan (Siagian dan Suriadi, 2012:117-118).
2. Penilaian atas perencanaan, yaitu mencoba memilih dan menetapkan prioritas terhadap berbagai alternatif dan kemungkinan atas cara Menurut Stoner dalam (Ketaren, 2009:14)

Program secara harfiah diartikan sebagai rencana aktivitas atau rencana kegiatan dalam suatu wadah tertentu. Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh Stoner tersebut maka mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Penyusunan program tidak semudah yang diperkirakan banyak orang, karena memerlukan waktu, uang dan pikiran. Tidak saja dari orang-orang yang membuatnya tetapi juga dari pihak-pihak yang akan terlibat dalam pelaksanaannya dikemudian hari. Suatu program tidak hanya diuraikan tentang kegiatan apa, tetapi juga mengenai mengapa dilakukan kegiatan tersebut. Pembuatan penyusunan program perlu diperhatikan azas-azas di bawah ini:

1. Disusun berdasarkan analisa dan waktu.
2. Dipilih masalah-masalah berdasarkan kebutuhan-kebutuhan yang dirasakan.
3. Ditentukan tujuan-tujuan dan cara-cara pemecahannya yang akan memberikan kepuasan kepada semua pihak.
4. Mempunyai kekekalan tetapi luwes (*fleksibel*).

5. Mempunyai keseimbangan-keseimbangan untuk keseluruhan masyarakat tetapi dengan mengutamakan yang terpenting.
6. Ada rencana kerja yang jelas dan tetap.
7. Merupakan suatu proses yang terus-menerus.
8. Merupakan suatu proses pengajaran dan pembimbingan.
9. Merupakan suatu proses koordinasi.
10. Memberikan kesempatan untuk penilaian (evaluasi) hasil-hasil pekerjaan (Wiriaatmadja, 1998:69).

Menurut (Mangunhardjana, 1999:37) pembinaan adalah menekankan pada pengembangan manusia dari segi praktis, yaitu pengembangan sikap, kemampuan dan kecakapan. Mangunhardjana mengatakan bahwa dalam pembinaan, orang tidak sekedar dibantu untuk mempelajari ilmu murni, tetapi ilmu yang dipraktekkan tidak dibantu untuk mendapatkan pengetahuan demi pengetahuan tetapi pengetahuan untuk dijalankan. Orang terutama dilatih untuk mengenal kemampuan dan mengembangkannya agar dapat memanfaatkannya secara penuh dalam bidang hidup atau kerja mereka. Unsur pokok dalam pembinaian adalah mendapatkan sikap dan kecakapan. Pembinaan dapat diartikan proses belajar untuk melepaskan hal-hal yang dianggap sudah tidak berguna dan menggantinya dengan mempelajari pengetahuan dan praktek baru.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pembinaan berfungsi untuk menyampaikan informasi dan pengetahuan, merubah dan mengembangkan sikap, memberikan latihan, mengembangkan kecakapan dan keterampilan. Pembinaan akan berjalan dengan baik apabila seseorang telah mengikuti pembinaan yang memiliki kemampuan untuk:

1. Melihat diri dan pelaksanaan hidup serta kerjanya.
2. Menganalisa situasi kehidupan dan kerjanya dari segi positif dan negatif.
3. Menemukan masalah-masalah dalam kehidupan serta berusaha mengatasinya.
4. Menemukan hal-hal yang sebaiknya diubah atau diperbaiki.
5. Merenungkan sasaran yang ingin dicapai dalam hidup setelah mengikuti pembinaan (Mangunhardjan, 1999:16).

Seminar advokasi anak jalanan yang dikutip oleh (Soedijar, 2004:29)

mengatakan bahwa sasaran pembinaan anak jalanan:

1. Melindungi dan berusaha mengangkat derajat anak jalanan.
2. Memberikan pelayanan secara teliti sehingga kesehatan dan gizi mereka tetap terjamin.
3. Menumbuhkan rasa sadar diri, semangat kerja dan mengangkat derajat hidup mereka sendiri bahkan keluarga dan masyarakat sekitarnya.
4. Memberikan pengarahan pada waktu bermain, rekreasi dan pada saat waktu luangnya.

Isi dari program pembinaan harus sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai. Dengan demikian sasaran tersebut akan menjadi jawaban dari permasalahan yang dihadapi para anak jalanan. Suatu pembinaan yang tidak mempunyai sasaran yang jelas dapat mengandung bahaya yang besar karena kegiatan itu tidak akan memiliki arah dan tujuan. Sasaran perlu dirumuskan dengan jelas dan tegas dan sasaran harus ada hubungannya dengan minat dan kebutuhan yang dibina.

Program pembinaan memerlukan integritas dari seluruh program pembinaan, maka:

1. Perlu dijaga agar dalam seluruh program diciptakan variasi, metode dalam mengolah kegiatan agar program berjalan lancar, memikat dan tidak monoton serta tidak membosankan.
2. Perlu diketahui sikap, pengalaman dan keahlian Pembina dalam bidang pembinaan. Sikap Pembina sangat menentukan cara pelaksanaan program (Soedijar, 2004:29).

2.5. Karakteristik Anak Jalanan

Istilah anak jalanan pertama kali diperkenalkan di Amerika Selatan, tepatnya di Brazilia, dengan nama *Meninos de Ruas* untuk menyebut kelompok anak-anak yang hidup di jalanan dan tidak memiliki ikatan dengan keluarga. Istilah anak jalanan berbeda-beda untuk setiap tempat, misalnya di Columbia mereka disebut “*gamin*” (urchin atau melarat) dan “*chinces*” (kutu kasur), “*marginais*” (*criminal* atau *marjinal*) di Rio, “*pa'jaros frutero*” (perampok kecil) di Peru, “*pollilas*” (ngrengat) di Bolivia, “*resistoleros*” (perampok kecil) di Honduras, “*Bui Doi*” (anak dekil) di Vietnam, “*saligoman*” (anak menjijikkan) di Rwanda. Istilah-istilah itu sebenarnya menggambarkan bagaimana posisi anak-anak jalanserta aktivitas mereka dalam masyarakat.

Menurut perserikatan bangsa-bangsa, yang dimaksud dengan anak jalanan adalah anak-anak yang karena sebab-sebab tertentu pada orangtuanya, sehari-hari berada di jalanan untuk mencari nafka (Media informatika, No.21,89/90). Departemen Sosial (baru saja dibubarkan) memberikan tiga kategori (Kompas, 28 Oktober 1998), pertama, anak jalanan yang hidup dan tinggal di jalan sepanjang

waktu (*children of the street*). Mereka tidak bersekolah dan tidak memiliki hubungan dengan keluarga dan rumahnya. Kedua, anak-anak yang hidup dan menggelandang di jalan tetapi secara periodik pulang ke rumah dan keluarganya (*children of the street*). Ketiga, anak jalanan yang tinggal dengan keluarganya tetapi bekerja di jalanan (*vulnerable to be street children*).

Para peneliti membedakan anak-anak yang mereka observasi di jalan (dalam Rizzini, 1994) ke dalam dua kategori, yaitu: anak-anak jalanan yang tetap berhubungan dengan keluarganya (*kids in the street*) dan anak-anak yang betul-betul berpisah dengan keluarga (*the true street kids*).

Anak jalanan adalah anak-anak yang mencari nafkah di jalanan. Mereka pada umumnya bekerja sebagai pengamen, pedagang asongan, gelandangan, pengemis, penjual koran, tukang semir sepatu, pemulung, tukang parker hingga pekerja seks anak. Anak jalanan sebagian besar menghabiskan waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan dan tempat-tempat umum lainnya. Resistensinya terhadap permasalahan di jalanan cukup tinggi (Batubara, 2010:15).

Dari definisi-definisi yang dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa anak jalanan adalah seseorang yang masih belum dewasa (secara fisik dan psikis) yang menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan dengan melakukan kegiatan-kegiatan untuk mendapatkan uang guna mempertahankan hidupnya yang terkadang mendapat tekanan fisik atau mental dari lingkungannya.

Menurut Surya Mulandar (1996:45), ada sejumlah penyebab fenomena anak yang bekerja, antara lain tekanan ekonomi keluarga, dipaksa orang tua, diculik dan terpaksa bekerja oleh orang yang lebih dewasa, asumsi bahwa dengan bekerja dapat digunakan sebagai sarana bermain, dan pembenaran budaya bahwa

sejak kecil anak harus bekerja. Ada pula yang menyebutkan bahwa faktor-faktor penyebab anak turun ke jalan adalah kemiskinan keluarga, kesibukan orangtua, penolakan masyarakat karena cacat atau anak haram, rumah tangga yang berkonflik, dan salah satu atau kedua orangtua meninggal dunia.

Di Indonesia penyebab meningkatnya anak jalanan dipicu oleh krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998. Pada era tersebut selain masyarakat mengalami perubahan secara ekonomi, juga menjadi masa transisi pemerintahan yang menyebabkan begitu banyak permasalahan sosial muncul. Secara langsung dampak krisis ekonomi memang terkait erat dengan terjadinya peningkatan jumlah anak jalanan di beberapa kota besar di Indonesia.

Hal ini akhirnya memberikan ide-ide menyimpang pada lingkungan sosial anak untuk mengeksploitasi mereka secara ekonomi, salah satunya dengan melakukan aktivitas di jalanan. Abu Huraerah (2006:78) menyebutkan beberapa penyebab munculnya anak jalanan, antara lain:

1. Orang tua mendorong anak bekerja dengan alasan untuk membantu ekonomi keluarga;
2. Kasus kekerasan dan perlakuan salah terhadap anak oleh orang tua semakin meningkat sehingga anak lari ke jalanan;
3. Anak terancam putus sekolah karena orang tua tidak mampu membayar uang sekolah;
4. Makin banyak anak yang hidup di jalanan karena biaya kontrak rumah mahal/meningkat;

5. Timbulnya persaingan dengan pekerja dewasa di jalanan, sehingga anak terpuruk melakukan pekerjaan berisiko tinggi terhadap keselamatannya dan eksploitasi anak oleh orang dewasa di jalanan;
6. Anak menjadi lebih lama di jalanan sehingga timbul masalah baru; atau
7. Anak jalanan jadi korban pemerasan, dan eksploitasi seksual terhadap anak jalanan perempuan.

Dengan situasi tersebut semestinya keluarga menjadi benteng utama untuk melindungi anakanak mereka dari eksploitasi ekonomi. Namun faktanya berbeda, justru anak-anak dijadikan "alat" bagi keluarganya untuk membantu mencari makan. Orang tua sengaja membiarkan anakanaknya mengemis, mengamen, berjualan, dan melakukan aktivitas lainnya di jalanan. Pembiaran ini dilakukan agar mereka memperoleh keuntungan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kondisi keluarga yang tergolong miskin, membuat dan memaksa anak jalanan untuk tetap "survive" dengan hidup di jalanan. Dapat dikatakan bahwa keberadaan mereka di jalanan adalah bukan kehendak mereka, tetapi keadaan dan faktor lingkungan luar termasuk keluarga yang mendominasi seorang anak menjadi anak jalanan.

2.6. Model Pelayanan Sosial Bagi Anak Jalanan

Sehubungan dengan masalah anak jalanan tersebut, maka dalam Modul Pelayanan Sosial Anak Jalanan Departemen Sosial (2006) mengembangkan 3 (tiga) model pelayanan sosial bagi anak jalanan yaitu:

1. *Community Based Social Services*

Pelayanan sosial terhadap anak jalanan ini dikembangkan di lingkungan masyarakat dimana anak dan keluarga anak jalanan

bertempat tinggal. Pelayanan ini dilakukan dengan cara melibatkan seluruh anak dan keluarga anak jalanan serta anggota masyarakat yang lainnya dalam proses pelayanan.

2. *Street Based Social Services*

Pelayanan sosial terhadap anak jalanan ini dikembangkan di lingkungan jalanan atau tempat publik lainnya, dimana anak jalanan menjalani hidup dijalan.

3. *Centre Based Social Services*

Pelayanan sosial terhadap anak jalanan ini dikembangkan di lembaga pelayanan khusus dalam bentuk panti atau yang sejenisnya. Anak diambil dari lingkungan jalanan atau tempat publik lainnya.

Jadi dari Masing-masing pendekatan tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan yang saling melengkapi, sehingga dalam penggunaannya antara pelayanan sosial yang satu dengan pelayanan sosial yang lain harus bersifat simultan. Pelayanan ketiganya dapat dilakukan dalam bentuk program rumah singgah, pelayanan keliling anak jalanan, pondok sosial, rumah perlindungan anak jalanan dan pelayanan sosial alternatif lainnya.

2.7. Penelitian Relevan

1. Dari jurnal Herlina Asri yang berjudul *Kehidupan Anak Jalanan Di Indonesia: Faktor Penyebab, Tatanan Hidup Dan Kerentanan Berperilaku Menyimpang* (2014). Menurut Herlina Asri Menjadi anak jalanan bukan pilihan yang diinginkan setiap orang, terutama untuk masalah keamanan. Anak jalanan

sering dianggap sebagai sebuah masalah, dan belum ada peraturan yang dapat untuk mengatasi fenomena ini. Tulisan ini menggunakan studi literatur untuk mengeksplorasi penyebab, tatanan hidup, dan kerentanan yang dihadapi anak jalanan sehingga cenderung berperilaku menyimpang. Hasil kajian menunjukkan keberadaan anak jalanan disebabkan oleh kemiskinan, penyimpangan kepribadian, dan faktor luar dari anak tersebut. Mereka memiliki tatanan hidup sendiri dan seringkali dianggap sebagai sampah masyarakat. Kehidupan jalanan yang tidak kondusif dan kurangnya pengawasan dari keluarga menjadikan anak jalanan sangat rentan terhadap berbagai bentuk tindak kekerasan. Oleh karenanya, untuk menanggulangi masalah anak jalanan diperlukan perubahan menyeluruh agar mereka tidak kembali hidup dan bekerja di jalanan lagi.

Perbedaan antara jurnal dari Herlina asri dengan penelitian saya yaitu untuk meneliti mengenai faktor penyebab dari munculnya anak jalanan dan untuk penelitian Herlina Asri ini meneliti mengenai munculnya anak jalanan di setiap provinsi yang ada di Indonesia, yang penelitian ini lebih luas jangkauannya. Sedangkan untuk penelitian skripsi saya lebih menakan pada mengevaluasi dari sebuah program kebijakan yang ditetapkan untuk mengatasi anak jalanan dan lebih di fokuskan pada kota medan sumatera utara.

2. Elvira Destie (2018) dengan judul penelitian "Evaluasi Program Anak Jalanan Di LSM Komunitas Peduli Anak Di Kampung Aur Medan" dengan hasil penelitian Anak jalanan merupakan salah satu permasalahan sosial yang sering dihadapi oleh tiap negara di dunia. Anak jalanan terbagi menjadi tiga, yaitu: anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomisebagai pekerja anak di jalan,

namun masih mempunyai hubungan yang kuat dengan orangtua mereka. Anak-anak yang berpartisipasi penuh di jalanan, baik secara sosial maupun ekonomi. Anak-anak yang berasal dari keluarga yang hidup di jalanan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pencapaian tujuan program pembinaan melalui LSM KOPA bagi anak jalanan di Kampung Aur. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat program pembinaan melalui LSM KOPA bagi anak jalanan di Kampung Aur. Karena Kampung Aur berada di daerah padat huni di pinggiran Sungai Deli, dengan kondisi masyarakat miskin perkotaan yang banyak memunculkan persoalan-persoalan yang berlatar belakang pada kehidupan anak, seperti persoalan anak jalanan dan anak yang bermasalah dengan keluarganya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data adalah observasi/pengamatan, dokumentasi, dan wawancara. Data yang sudah dikumpulkan akan disajikan dengan mereduksi data yang tidak diperlukan dalam penelitian. Setelah itu dilakukan penarikan kesimpulan/verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian, program berjalan dengan baik meskipun belum terlalu signifikan, hanya saja masih mempunyai kekurangan pada bagian input, yaitu sumber daya manusia, fasilitas dan juga dana yang belum memadai.

Perbedaan antara penelitian skripsi Elvira destie dengan penelitian penulis ini adalah, pada penelitian Elvira Destie lebih merujuk pada sebuah keberhasilan organisasi LSM KOPA yang ada di kampung aur Medan, tetapi dalam penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa masih banyak kekurangan yang signifikan seperti kurangnya sumber daya manusia, fasilitas dan sumber dana. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah untuk

menilai sebuah program kebijakan pembinaan anak jalanan yang ada di Dinas Sosial.

3. Nurul Tantina (2017) dengan judul Evaluasi Kebijakan Pemerintah Dalam Menangani Anak Jalanan Pada Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota TanjungPinang Tahun 2014. Dengan hasil penelitian Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang bersama beberapa instansi terkaita seperti Komisi Perlindungan Anak Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Pemberdayaan Perempuan, Lembaga Swadaya Masyarakat, serta pihak kepolisian harus saling bersinergi untuk mengurangi tingkat anak jalanan di Kota Tanjungpinang. Hasil pantauan diketahui bahwa di simpang lampu merah di Kota Tanjungpinang, semakin hari anak jalanan termasuk anak Punk, penjaja koran, pengemis dan lainnya terlihat semakin bertambah. Tujuan penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan evaluasi Kebijakan Pemerintah Dalam Menangani Anak Jalanan Pada Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang Tahun 2014. Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian Deskriptif Kualitatif. Adapun kriteria informan adalah pegawai yang memahami tentang penanganan anak jalanan, pegawai yang bertugas turun ke lapangan menangani pelayanan dan rehabilitasi sosial mereka adalah kepala seksi Kesejahteraan sosial, kemudian staff Dinas Sosial yang turun ke lapangan, pengurus rumah singgah, serta staff KPAID Kota Tanjungpinang kemudian akan diikutsertakan anak jalanan sebagai informan yang merasakan dampak dari kebijakan pemerintah dalam menangani anak jalanan. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan bahwa Kebijakan Pemerintah Kota Tanjungpinang Dalam Menangani Anak Jalanan

Pada Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang Tahun 2014 belum berjalan dengan baik karena masih banyak hal yang harus diperhatikan. Walaupun sudah ada Pekerja Sosial yang memiliki keahlian dalam bidang pelayanan kesejahteraan dan perlindungan anak. Peningkatan Kapasitas Pendamping dan Kelembagaan, melalui seleksi, sertifikasi dan bimbingan pemantapan/pelatihan bagi Pekerja Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Relawan Sosial dan Lembaga Kesejahteraan Sosial. Meskipun kebijakan sudah dikomunikasikan dengan jelas kepada aparat pelaksana, tetapi jika tidak didukung oleh tersedianya sumber daya secara memadai untuk pelaksanaan kebijakan, maka efektivitas kebijakan akan sulit dicapai.

Keterkaitan antara penelitian skripsi Nurul Tantiana dengan penulis skripsi ini adalah sama-sama mengevaluasi sebuah program kebijakan pembinaan anak jalanan guna mengurangi jumlah anak jalanan. Untuk perbedaan antara penelitian skripsi Nurul Tantiana dengan penulis skripsi ini adalah program yang dilakukan untuk menangani anak jalanan di kota Tanjungpinang bekerjasama dengan beberapa instansi seperti komisi perlindungan anak daerah, Badan pemberdayaan perempuan.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Dimas Arfan Fesdyanda (2012) yang berjudul Evaluasi Program Pembinaan Anak Jalanan Di Rumah Singgah Setara Semarang. Format pembinaan anak jalanan yang tepat sesuai kebutuhan dan harapan dengan memperhatikan yakni faktor dari dalam dan faktor dari luar. Diantara faktor dari dalam adalah potensi dan kelemahan yang ada, sedangkan faktor dari luar adalah peluang dan hambatan. Upaya mencari format pengembangan model pada pembinaan anak jalanan melalui rumah singgah ini akan dilakukan dengan

menggali potensi, kelemahan, peluang dan hambatan dari permasalahan anak jalanan yang akan dipadukan dengan pola pendekatan yang ada sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dari anak jalanan itu sendiri. Penelitian ini bertujuan adalah untuk mendiskripsikan pencapaian tujuan program pembinaan melalui Rumah Singgah bagi anak jalanan di Kota Semarang. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat program pembinaan melalui Rumah Singgah bagi anak jalanan di Kota Semarang Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data adalah observasi/pengamatan, dokumentasi, dan wawancara. Data yang sudah dikumpulkan akan disajikan dengan mereduksi data yang tidak diperlukan dalam penelitian. Setelah itu dilakukan penarikan kesimpulan/verifikasi. Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan, maka penulis mengajukan rekomendasi sebagai berikut : Input, terdiri dari unsur sumber daya pendukung dan sumber daya manusia. Ketersediaan sumber daya pendukung yang diperlukan pembinaan anak jalanan di rumah singgah Setara tergolong baik. Proses, Rumah singgah Setara menetapkan program kerjanya dengan menitik beratkan pada pemberdayaan anak-anak jalanan melalui pembelajaran. Outputs (Hasil), intensitas capaiannya belum optimal, namun sejauh kondisi memungkinkan karena terbatasnya sumber dana, sumber daya manusia maupun sarana mobilitas yang dimiliki rumah singgah. Outcomes (Dampak), dilihat dari aspek kinerja menunjukkan belum optimalnya tingkat kemampuan ataupun kapabilitas para petugas rumah singgah dalam memahami prosedur pelayanan maupun pemahaman profesi pekerjaan sosial hingga membawa dampak pada pencapaian kinerja pelay

2.8. Kerangka Pemikiran

Kemiskinan bukanlah satu-satunya faktor penyebab munculnya anak jalanan. Permasalahan tersebut merupakan kenyataan social kemasyarakatan yang juga disebabkan oleh berbagai faktor seperti modernisasi, laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, masalah disorganisasi keluarga, lingkungan dari tempat tinggal, kebodohan, urbanisasi, ketiadaan lapangan pekerjaan dan sulitnya mendapatkan layanan pendidikan. Anak jalanan bekerja dengan cara yang mudah yaitu sebagai pengamen, penjual rokok, penjual koran, dan sebagainya. Anak-anak yang bekerja di jalanan dapat membantu keluarga dalam perekonomiannya dan kematangan pribadi. Anak yang bekerja di jalanan juga mempunyai efek samping yaitu terjadinya kemunduran fisik, anak putus sekolah dan juga kemerosotan moral.

Berdasarkan program yang telah disusun tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis maka pemerintah daerah yang dimaksud penulis dalam melaksanakannya adalah aparatur yang bertanggung jawab dan berwenang yaitu Dinas Sosial Kota Medan yang telah membuat program pembinaan anak jalanan guna untuk meminimalisasikan keberadaan anak jalanan di Kota Medan.

Tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah adalah menciptakan kesejahteraan masyarakat, maka dari itu Dinas Sosial Kota Medan membuat peraturan tentang program pembinaan anak jalanan, yaitu:

1. Program penertiban. Program penertiban yang dimaksud yaitu program yang dilakukan oleh Dinas Sosial bekerja sama dengan aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan pihak lain yang terlibat untuk

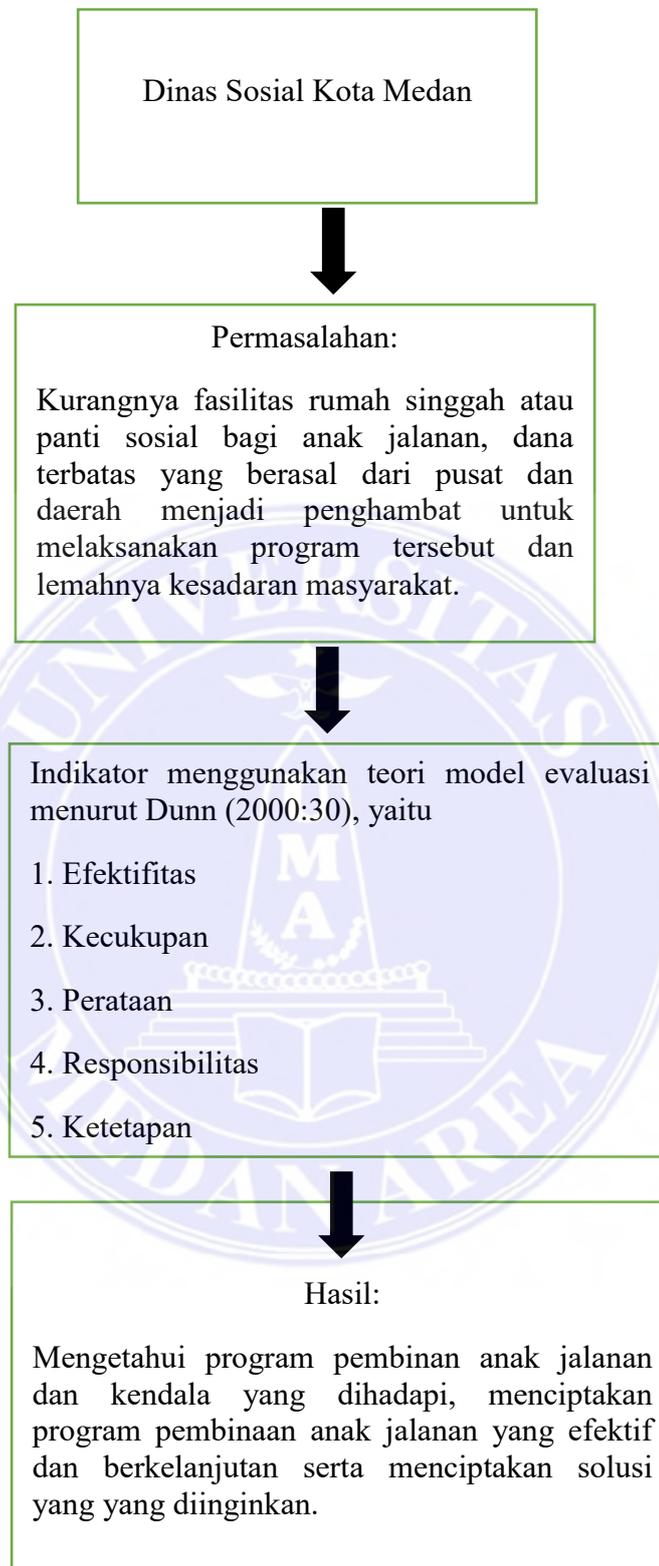
melakukan razia di tempat-tempat umum anak jalanan bekerja dan berkeliaran.

2. Program Pelatihan Keterampilan. Program ini dilakukan dengan pemberian keterampilan kepada anak jalanan berupa kerajinan tangan dan pekerjaan lain yang bisa meningkatkan bakat dan minat anak untuk bisa berkarya. Adapun manfaat yang diharapkan dari program pembinaan anak jalanan antara lain anak memiliki keterampilan seperti pembuatan kerajinan tangan, serta diharapkan anak tidak lagi kembali ke jalanan.

Berbicara tentang bagaimana implementasi suatu kebijakan dapat berjalan efektif dipengaruhi oleh beberapa faktor. Penulis mengaitkan keefektifan suatu implementasi kebijakan dengan faktor-faktor sebagai berikut:

1. Faktor Pendukung, Faktor pendukung yang dimaksud disini adalah segala hal yang sifatnya membantu tersosialisasinya kebijakan pemerintah daerah dalam hal pembinaan anak jalanan di Kota Medan yang sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
2. Faktor Penghambat, Faktor Penghambat disini merupakan segala sesuatu yang menjadi pengganjal atau penghalang terselenggaranya pembinaan anak jalanan di Kota Medan yang sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Maka dari kebijakan tersebut anak dapat memiliki keterampilan tangan yang nantinya dapat dijual dan dikembangkan sebagai usaha kecil dan bisa menghasilkan uang dan anak tidak turun kejalanan.



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lexy j. Moleong (2007:6) mendefinisikan penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi tindakan, dan lain-lain. Secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Menurut Saryono (2010) penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif.

Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang dimiliki. Jadi dapat disimpulkan bahwa pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang dilakukan secara utuh kepada subjek peneliti dimana peneliti menjadi instrumen kunci dalam penelitian, kemudian hasil pendekatan tersebut diuraikan dalam bentuk kata-kata yang tertulis dari data empiris yang diperoleh.

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini, peneliti melakukan penelitian di Kantor Dinas Sosial Kota Medan, Jl. Pinang Baris No. 114 B, Medan. Penelitian dilaksanakan mulai bulan Juni sampai Juli 2021.

3.3. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian memiliki peran yang sangat penting dalam pengambilan data dan informasi. Menurut Afrizal (2016:139) informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya ataupun orang lain atau suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti atau pewawancara mendalam. dalam penelitian kualitatif, informan dibagi menjadi tiga yaitu :

1. Informan Kunci

Menurut Afrizal (2016:139) informan kunci adalah informan yang memiliki informasi secara menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat peneliti. Yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini Pengadministrasi Rehabilitasi Masalah Sosial, Bapak Lamo Mayjend Lumban Tobing.

2. Informan Utama

Menurut Afrizal (2016:139) informan utama adalah orang yang mengetahui secara teknis dan detail tentang masalah penelitian yang akan dipelajari. Yang menjadi informan utama dalam penelitian ini Ibu Dwi Mutia sebagai staff di bidang Rehabilitasi, Bapak Dikin sebagai Pengadministrasi Rehabilitasi Masalah Sosial Anak Terlantar, dan Bapak Yusrizal Sikumbang sebagai Pengadministrasi Rehabilitasi Masalah Sosial Anak terlantar.

3. Informan Tambahan

Menurut Afrizal (2016:139) informan tambahan merupakan orang yang dapat memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap analisis dan pembahasan dan penelitian kualitatif. Yang menjadi informan tambahan dalam penelitian ini adalah 4 orang anak jalanan yang berada di tempat rehabilitasi.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2015:308) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan), interview (wawancara), dan dokumentasi.

1. Observasi (pengamatan)

Menurut Sutrisno Hadi dalam Sugiyono (2015:203) observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis.

2. Interview (wawancara)

Menurut Esterbrg dalam Sugiyono (2015:317) wawancara didefinisikan sebagai berikut “ *a meeting of two persons to exchange information and idea through question and responses, resulting in communication and joint construction of meaning about a particular topic*”. Artinya wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat di konstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

Sedangkan menurut Susan Stainback dalam Sugiyono (2015:318) mengemukakan bahwa dengan wawancara, maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi.

3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2015:329) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life histories), cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain.

4. Triangulasi data

Menurut Sugiyono (2015 : 3242) triangulasi adalah sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.

3.5. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2015:336) mengemukakan bahwa analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai dilapangan. Menurut Sugiyono (2015:336) menyatakan analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil

penelitian. Dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses dilapangan bersamaan dengan pengumpulan data.

Pada penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah model *Miles* dan *Huberman* (2012:255) meliputi :

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan upaya untuk mengumpulkan data dengan berbagai macam cara seperti : observasi, wawancara, dokumentasi dan sebagainya.

2. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemulihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan selama meneliti untuk memilih informasi yang mana dianggap yang menjadi pusat penelitian lapangan.

3. Penyajian Data

Penyajian data yaitu sebagai kumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan atau pengambilan tindakan. Pengambilan data ini membantu penulis memahami peristiwa yang terjadi dan mengarah pada analisa dan tindakan lebih lanjut berdasarkan pemahaman. Alasan dasar dilakukan pada tahapan ini adalah menyederhanakan informasi yang kompleks kedalam suatu bentuk yang disederhanakan dan mudah dipahami.

4. Kesimpulan Data

Setelah data disajikan maka dilakukan kesimpulan data atau verifikasi. Dalam pengambilan keputusan atau verifikasi membuat kesimpulan sementara dari semula belum jelas menjadi lebih terperinci dengan cara di verifikasi dalam arti meninjau catatan-catatan dengan maksud data yang diperoleh tidak valid untuk memperoleh jawaban atas.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

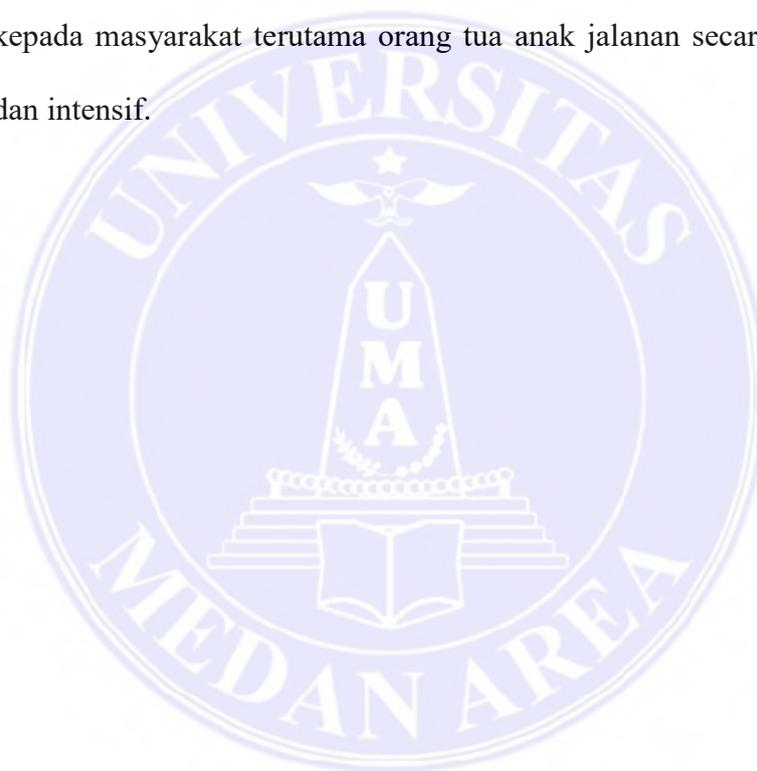
Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka adapun yang menjadi simpulan dalam penelitian ini yakni:

- 1) Bahwa evaluasi program pembinaan anak jalanan di Kota Medan telah dilakukan dengan cukup baik walau masih banyak kendala dalam pelaksanaannya baik dari segi efektivitasnya, aspek kecukupan fasilitas yang digunakan, aspek pemerataan kegiatan, aspek responsivitas serta aspek ketepatan program pembinaan.
- 2) Adapun faktor penghambat dalam melakukan pembinaan anak jalanan di Kota Medan, yakni kurangnya kesadaran yang dimiliki oleh masyarakat serta kurangnya sarana dan prasarana dalam melaksanakan program pembinaan anak jalanan, seperti tidak adanya rumah singgah ataupun panti tempat penitipan anak. Fasilitas yang digunakan selama ini berasal dari Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara. Selain itu, keterbatasan dana juga menjadi hal yang utama yang membuat program ini menjadi terhambat atau tidak berjalan dengan baik.

5.2. Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai Evaluasi Program Pembinaan Anak Jalanan di Kota Medan, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

- 1) Harapannya Dinas Sosial Kota Medan menyediakan rumah atau tempat berlangsungnya kegiatan pembinaan anak jalanan sehingga tidak mengeluarkan biaya yang besar dalam menyewa tempat pelatihan.
- 2) Hendaknya Dinas Sosial Kota Medan dan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara melakukan kerjasama yang berkelanjutan demi mengurangi jumlah anak jalanan di Kota Medan.
- 3) Harapannya juga agar Dinas Sosial Kota Medan melakukan sosialisasi kepada masyarakat terutama orang tua anak jalanan secara berkelanjutan dan intensif.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Afrizal. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Akbar M. Firyal, Widia Kurniati. 2018. *Studi Evaluasi Kebijakan (Evaluasi Beberapa Kebijakan Di Indonesia)*. Gorontalo: Ideas Publishing. Alfabeta.
- Anggara, Sahya. 2018. *Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Bagong Suyanto, 2010. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Batubara, Hambali. 2010. *Penelitian Profil Anak Jalanan di DKI Jakarta*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Huberman, Miles B. (2012). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta : UI Press.
- Huraerah, Abu. 2006, *Kekerasan Terhadap Anak: Fenomena Masalah Sosial Kritis di Indonesia*, Bandung: Nuansa.
- Ketaren, Nurlela. 2009. *Asas-asas Manajemen*. Medan: USU Press.
- Mangunhardjana, A. 1999. *Pembinaan, Arti, dan Metodenya*, Jakarta: Kanisius
- Modul Pelayanan Sosial Anak Jalanan Departemen Sosial (2006)
- Moleong, Lexy J. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, Deddy . 2016. *Studi Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik*. Bandung:
- Siagian, Matias, dan Suriadi, Agus. 2012. *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan CSR Perspektif Pekerjaan Sosial*. Medan: Fisip USU Press.
- Soedijar, A. 2004. *Penelitian Profil Anak Jalanan DKI Jakarta, Badan Penelitian Dan Pengembangan Sosial*, Jakarta: Departemen Sosial.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama.
- Sukardi.(2014). *Evaluasi Program Pendidikan dan Pelatihan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Surya Mulandar (ed.). 1996. *Dehumanisasi Anak Marginal: Berbagai Pengalaman Pemberdayaan*. Bandung: Akatiga.
- Tayibnapis, Farida Yusuf. 2000. *Evaluasi Program*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Wiriaatmadja, Rochiati. 2008. *Metode Penelitian Tindakan Kelas untuk Meningkatkan Kinerja Guru dan Dosen*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

KARYA ILMIAH:

Batubara, J. R.(2010). *Adolescent Development (Perkembangan Remaja)*. Jakarta. Sari Pediatri. Vol 12, No 1. Departemen Ilmu Kesehatan Anak RS Dr Cipto Mangunkusumo.

Dimas Arfan Fesdyanda (2012). *Evaluasi Program Pembinaan Anak Jalanan Di Rumah Singgah Setara Semarang*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Diponegoro. Semarang.

Elvira Destia, 2018. *Evaluasi Program Anak Jalanan Di Lsm Komunitas Peduli Anak Di Kampung Aur Medan*. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara.

Fesdyanda, A.D. 2012. *Evaluasi Program Pembinaan Anak Jalanan Di Rumah Singgah Setara Semarang*. Skripsi. Universitas Diponegoro

Herlina Astri, 2014. *Kehidupan Anak Jalanan Di Indonesia: Faktor Penyebab, Tatanan Hidup Dan Kerentanan Berperilaku Menyimpang*. *Jurnal Aspirasi*. Vol 5 (2).

Nurul Tantiana, 2017. *Evaluasi Kebijakan Pemerintah Dalam Menangani Anak Jalanan Pada Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang Tahun 2014*. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

PERUNDANG-UNDANGAN:

Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor : Kep. 178/K/07/2000 tanggal 18 Juli 2000 tentang evaluasi kinerja pembangunan

Keputusan Presiden RI No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convension on the Right of the Child* (Konvensi tentang hak-hak anak)

Pasal 9 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 31 Tahun 2013 tentang Koordinasi Penanggulangan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis

Perda Nomor 6 tahun 2003 Pasal 4 tentang larangan dan pengemisan serta praktek susila di Kota Medan.

UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

LAMPIRAN

Dokumentasi Penelitian



Kantor Dinas Sosial Kota Medan



Foto bersama dengan bapak Lamo Mayjend Lumban Tobing



Foto bersama dengan Ibu Dwi Mutia



Dokumentasi peneliti saat wawancara dengan informan



Foto peneliti dengan anak jalanan



